



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANTON BUDHI SETIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA KANWIL**
3. NHK : **125616**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.696.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/288 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 102.000.000
3. Tanah Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KARAWANG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. Tanah Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KARAWANG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.650.000.000
6. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 117.000.000
7. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
8. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000
9. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 792.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA NAV1 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
98.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI STRADA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
26.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
290.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
360.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	537.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.713.977.102
F. HARTA LAINNYA	Rp.	664.891.933
Sub Total	Rp.	10.403.869.035
III. HUTANG	Rp.	245.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.158.869.035

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.